



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

UTANG PEMKOT RP 12,3 M, ANGGARAN OPD DIPANGKAS

Rasionalisasi Anggaran di APBD Perubahan

BENGKULU - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berencana akan melakukan rasionalisasi anggaran disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rancangan APBD Perubahan mendatang. Pasalnya berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu Pemkot mempunyai utang sebesar Rp 12,3 Miliar.

Berdasarkan penelusuran RB, utang sebesar Rp. 12,3 miliar tersebut diantaranya berkaitan dengan pembayaran pengadaan buku dita-



hun 2014, pembangunan puskesmas hingga pengadaan obat-obatan. Dan proyek ini menjadi utang lantaran tidak bisa dibayarkan tahun sebelumnya karena beberapa sebab seperti keterlambatan pencairan dana alokasi khusus (DAK).

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Bengkulu Drs. Riduan, MSi membenarkan bahwa dalam rancangan APBD perubahan ini akan ada rasionalisasi anggaran di tiap OPD berkaitan penyelesaian utang tersebut. Artinya akan banyak usulan anggaran di beberapa OPD yang dipangkas untuk rasionalisasi tersebut.

☞ Baca **UTANG..** Hal 19

Sambungan dari hal 9

Namun ia menjelaskan, bahwa untuk membayar utang tersebut pemkot sebelumnya bermaksud menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang berjumlah sebesar Rp 10 miliar. "Namun setelah diteliti bahwa Silpa yang dimaksud untuk beberapa kegiatan lain seperti pembayaran tunjangan sertifikasi, dan dana pembayaran jaminan kesehatan," jelas Riduan.

Karena tidak ada sumber dana lain untuk membayar utang tersebut, menurut Riduan, akhirnya pemkot mengambil keputusan melakukan rasionalisasi

anggaran disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Yang jelas saat ini kami masih membahas lebih dalam, dan ini akan kita sampaikan juga ditingkat DPRD nantinya," ungkapnya.

Terkait hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Hamsi, Amd mengkritisi langkah Pemkot akan melakukan rasionalisasi anggaran untuk pembayaran utang tersebut. Sebab menurutnya, rencana tersebut belum disampaikan ke DPRD Kota.

"Setahu saya dulu, berkaitan dengan utang pemkot itu sudah ada anggarannya. Kok sekarang malah ada rencana rasion-

alisasi anggaran OPD lagi? Yang jelas sampai saat ini kami belum tahu utang mana lagi yang dimaksud itu. Jadi sebaiknya pemkot segera sampaikan ke DPRD, agar ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum," kritik Hamsi.

Menurut Hamsi, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan berkaitan dengan persoalan utang pemkot tersebut untuk melihat kejelasan masalahnya. "DPRD ini bagian dari fungsi pengawasan. Maka kita tidak mau gegabah dalam hal ini. Karena kita ingin mengetahui lebih dalam utang apa saja yang dimaksud itu," pungkasnya. (new)